BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengelolaan dan penatausahaan keuangan pemerintah desa dilaksanakan secara terpisah dari keuangan pemerintah kabupaten/kota. Dengan demikian, pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengelola, mencatat, serta menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan desa secara mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan keuangan desa yang mandiri tersebut bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran. Selain itu, desa memiliki berbagai sumber pendapatan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Sumber pendapatan tersebut meliputi Pendapatan Asli Desa (PADesa) yang berasal dari hasil usaha desa, hasil pengelolaan aset desa, swadaya dan partisipasi masyarakat, gotong royong, serta pendapatan asli desa lainnya yang sah. Selain Pendapatan Asli Desa, pemerintah desa juga memperoleh Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota, bantuan keuangan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, hibah, sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat, serta

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI STIA AMUNTAI

sumber pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keuangan desa merupakan seluruh hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan desa yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pengelolaan keuangan desa merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan desa. Seluruh tahapan tersebut harus dilaksanakan berdasarkan asas transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta tertib dan disiplin anggaran agar penggunaan dana desa dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun secara hukum. Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa selama satu tahun anggaran. APBDes yang telah disusun kemudian dibahas dan disepakati bersama antara kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa. Setelah pelaksanaan APBDes berakhir, pemerintah desa wajib menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes sebagai bentuk akuntabilitas kepada pemerintah daerah dan masyarakat desa.

Untuk mendukung pengelolaan keuangan desa yang lebih efektif dan efisien, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri mengembangkan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI STIA AMUNTAI

Aplikasi ini dirancang sebagai sistem informasi yang mampu membantu pemerintah desa dalam melaksanakan seluruh proses pengelolaan keuangan desa secara terintegrasi, mulai dari tahap perencanaan, penyusunan anggaran, pelaksanaan kegiatan, penatausahaan transaksi keuangan, penyusunan laporan keuangan, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban. Kehadiran aplikasi Siskeudes diharapkan mampu meminimalkan kesalahan pencatatan, meningkatkan ketepatan penyusunan laporan keuangan, serta memperkuat sistem pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan desa.

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) merupakan alat bantu yang diperuntukkan bagi pemerintah desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa secara terkomputerisasi. Penerapan aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah aparatur desa dalam mengelola administrasi keuangan sehingga seluruh proses pencatatan dan pelaporan dapat dilakukan secara lebih cepat, tepat, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah. Selain mempermudah proses pelaporan keuangan, Siskeudes juga berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa melalui penerapan sistem administrasi yang tertib, transparan, akuntabel, dan terdokumentasi dengan baik. Dengan adanya aplikasi ini, risiko terjadinya kesalahan administrasi maupun penyimpangan dalam pengelolaan dana desa dapat diminimalkan. Oleh karena itu, penerapan Siskeudes diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja aparatur desa sekaligus mendukung terciptanya pemerintahan desa yang profesional, modern, dan berorientasi pada pelayanan publik. Pengguna utama aplikasi Siskeudes meliputi kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan keuangan, bendahara desa,

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI STIA AMUNTAI

serta perangkat desa lainnya yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan desa.

Tampilan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dirancang dengan antarmuka yang sederhana, sistematis, dan mudah dipahami sehingga dapat digunakan oleh seluruh aparatur desa dengan berbagai tingkat kemampuan dalam mengoperasikan komputer. Setiap menu dalam aplikasi saling terhubung sehingga seluruh proses pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan secara terintegrasi mulai dari penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan, hingga penyampaian laporan pertanggungjawaban. Selain memudahkan proses administrasi, tampilan aplikasi juga dilengkapi dengan berbagai fitur pengendalian yang membantu pengguna dalam meminimalkan kesalahan input data, memastikan kesesuaian kode rekening, serta menjaga konsistensi antara perencanaan, realisasi anggaran, dan pelaporan keuangan. Dengan demikian, penggunaan aplikasi Siskeudes tidak hanya meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan desa, tetapi juga memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kualitas tata kelola pemerintahan desa secara keseluruhan. Adapun tampilan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) umumnya terdiri atas beberapa elemen utama yang mendukung seluruh tahapan pengelolaan keuangan desa secara terpadu.

1. Perencanaan:
    a. Input Anggaran: Memungkinkan penginputan anggaran desa yang telah disepakati, termasuk sumber-sumber pendapatan dan alokasi anggaran untuk berbagai kegiatan.

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI STIA AMUNTAI

b. Rencana Kerja: Menyediakan fitur untuk menyusun rencana kerja desa yang sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.

c. Perubahan Anggaran: Memungkinkan pengajuan dan persetujuan perubahan anggaran jika diperlukan.

2. Pelaksanaan:

a. Transaksi Keuangan: Memfasilitasi pencatatan transaksi keuangan, seperti penerimaan pendapatan, pengeluaran, dan transfer dana.

b. Pembukuan: Menyediakan fasilitas pembukuan yang terintegrasi untuk mencatat semua transaksi keuangan dengan baik.

c. Monitoring Pelaksanaan: Memberikan informasi terkini mengenai pelaksanaan anggaran dan pengeluaran, serta memantau indikator-indikator kunci.

3. Penatausahaan:

a. Pencatatan Aset: Memungkinkan pencatatan dan pengelolaan aset desa, seperti tanah, bangunan, dan peralatan.

b. Pengelolaan Utang Piutang: Memfasilitasi pengelolaan utang dan piutang desa.

c. Rekonsiliasi Keuangan: Memberikan fasilitas rekonsiliasi keuangan untuk memastikan keakuratan catatan keuangan.

4. Pelaporan:

a. Laporan Keuangan: Menyediakan berbagai jenis laporan keuangan, seperti laporan realisasi anggaran, laporan kas, laporan perubahan posisi keuangan, dan laporan lainnya.

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI STIA AMUNTAI

b. Laporan Pertanggungjawaban yaitu seperti Memfasilitasi pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan desa kepada pemerintah dan masyarakat.
c. Analisis Keuangan: Memberikan tools untuk melakukan analisis keuangan desa, seperti analisis rasio keuangan, analisis trend, dan analisis lainnya.

Dengan menggunakan Siskeudes, pemerintah Desa dapat mengelola keuangan desa secara lebih transparan, akuntabel, dan efisien, sesuai dengan prinsip tata kelola keuangan desa yang baik.

Manfaat Siskeudes:

a. Mempermudah proses pengelolaan keuangan desa.
b. Meningkatkan kualitas laporan keuangan.
c. Meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan.
d. Membantu dalam pengawasan keuangan desa oleh pemerintah daerah.
e. Memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi tentang keuangan desa.

Namun pada saat ini, dalam penerapan sistem keuangan desa (Siskeudes) pada Kantor Desa Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Utara mengalami beberapa kendala seperti proses implementasi aplikasi sistem keuangan desa yang kompleks dan memerlukan waktu lama. Ketergantungan pada teknologi yang belum tentu tersedia atau stabil. Perubahan perilaku dan budaya kerja yang diperlukan untuk menggunakan aplikasi sistem keuangan desa. Sehingga dalam penerapan dan penggunaan aplikasi Sistem Keuangan

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI STIA AMUNTAI

Desa ini menjadi tidak efisien terutama dalam pengelolaan keuangan desa. kurangnya keterlibatan stakeholder, seperti masyarakat dan pemerintah daerah, dalam implementasi aplikasi sistem keuangan desa.

Observasi awal menunjukkan bahwa terdapat permasalahan, antara lain :

1. Kurangnya fasilitas pendukung seperti komputer, jaringan internet dan printer, hal ini menyebabkan penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Kantor Desa Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Utara mengalami keterlambatan dalam membuat laporan keuangan desa yang mengakibatkan kesulitan dalam pengambilan keputusan.
2. Kurangnya keterampilan dan pengetahuan sumber daya manusia atau aparat Desa Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam menggunakan aplikasi sistem keuangan desa. Sehingga sering terjadi kesalahan dalam memasukkan data keuangan desa yang mengakibatkan kesalahan dalam pelaporan dan analisis keuangan.
3. Kurangnya pelatihan dan pengembangan kepada aparat Desa Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam menggunakan aplikasi sistem keuangan desa. Sehingga menyebabkan aparat desa kesulitan dalam menggunakan aplikasi Siskeudes, sehingga mengakibatkan kesalahan dalam pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan dari latar belakang, maka peneliti tertarik mengangkat judul berkenaan dengan **"Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Di Kantor Desa Sungai Pandan Hulu Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara"**

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI STIA AMUNTAI

Berdasarkan bagian Latar Belakang dan Landasan Teori dari skripsi “Implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Kantor Desa Sungai Pandan Hulu Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara” oleh Rizki Nur Wahyu:

1. Urgensi Penelitian (Research Urgency)

   Urgensi penelitian menjelaskan alasan mengapa topik ini sangat penting dan mendesak untuk diteliti pada Latar Belakang:

   Tuntutan Regulasi dan Akuntabilitas Publik: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diwajibkan mengelola keuangan secara mandiri, transparan, akuntabel, dan berdisiplin anggaran karena mengelola dana yang bersumber dari APBN (Dana Desa), APBD (ADD), PADesa, serta bantuan keuangan lainnya.

   Ketergantungan pada Sistem Digital (Siskeudes): Aplikasi Siskeudes (dikembangkan BPKP dan Kemendagri) merupakan instrumen vital untuk mengintegrasikan proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan guna meminimalkan kesalahan pencatatan dan risiko penyelewengan.

2. Permasalahan/Fenomena Riil di Lapangan:

   Keterbatasan Infrastruktur: Terjadi kelangkaan/kekurangan fasilitas pendukung seperti perangkat komputer, printer, dan koneksi internet yang stabil di Kantor Desa Sungai Pandan Hulu, sehingga memicu keterlambatan penyusunan laporan keuangan dan menyulitkan pengambilan keputusan.

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI STIA AMUNTAI

Keterbatasan Kapasitas SDM: Aparat desa masih memiliki tingkat keterampilan dan pengetahuan teknologi yang rendah dalam pengoperasian aplikasi Siskeudes, yang berdampak pada seringnya terjadi kesalahan input data keuangan.

Minim dan Ketidakmerataan Pelatihan/Sosialisasi: Pelatihan Siskeudes belum intensif serta sosialisasi awal hanya menyentuh perangkat inti (seperti sekretaris dan bendahara) tanpa pembekalan praktik yang memadai bagi seluruh tingkatan perangkat desa.

3. Novelty Penelitian (Kebaruan)

Novelty menggambarkan sisi kebaruan atau keunikan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu:

Konstruksi Teoretis yang Spesifik: Penelitian ini menganalisis implementasi Siskeudes secara mendalam menggunakan 4 dimensi teori Implementasi Kebijakan George C. Edward III (Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi) yang dikontekstualisasikan dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Konteks Lokakarsa dan Geografis Lokal: Berfokus pada dinamika tata kelola pemerintahan desa di Desa Sungai Pandan Hulu, Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang memiliki kondisi geografis wilayah rawa/perdesaan dengan tantangan keterbatasan aksesibilitas teknologi dan jaringan pendukung.

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI STIA AMUNTAI

4. Perbandingan Kontras dengan Penelitian Terdahulu:

Penelitian (Amelda et al., 2024) di desa telukbuyung kabupaten karawang menunjukkan penerapan Siskeudes berjalan sangat baik keberhasilan perangkat desa telukbuyung dan pegawai desa lain semua komponen ini kompak dan berkomunikasi dengan baik untuk bertukar informasi dalam menyangkut operasional pelayanan, pelaporan keuangan desa telukbuyung.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menelaah kondisi sebaliknya, yaitu dinamika kegagalan optimalisasi/stagnasi penggunaan Siskeudes di wilayah perdesaan akibat masalah struktural birokrasi, kesenjangan komunikasi internal, serta keterbatasan daya dukung fasilitas kerja.

5. Research Gap (Celah Penelitian)

Research gap menunjukkan adanya kesenjangan antara kondisi ideal (das Sollen) dengan fakta lapangan (das Sein), maupun kesenjangan dalam literatur/penelitian terdahulu:

Gaps Antara Idealitas Kebijakan dan Realitas Implementasi (Empirical Gap):

Das Sollen (Kondisi Ideal): Siskeudes dirancang dengan antarmuka yang sederhana, terintegrasi, dan dilengkapi sistem pengendalian internal agar pencatatan keuangan desa berjalan cepat, tepat, transparan, dan akuntabel.

Das Sein (Kondisi Nyata): Di Kantor Desa Sungai Pandan Hulu, pengoperasian Siskeudes justru menjadi kompleks, memakan waktu

lama, tidak efisien, serta rentan kesalahan akibat minimnya sarana teknologi (komputer/internet) dan rendahnya kompetensi teknis perangkat desa.

6. Gaps Pembagian Tugas dan Struktur Birokrasi (Practical Gap):

   Terdapat kesenjangan pemahaman di mana Siskeudes hanya dipahami oleh pejabat/operator tertentu (seperti Sekdes dan Kaur Keuangan), sementara perangkat desa lainnya (seperti Seksi Pemerintahan atau Perencanaan) tidak terintegrasi secara utuh dalam alur pemanfaatan aplikasi. Hal ini menunjukkan adanya gap dalam pembagian struktur kerja dan alur komunikasi organisasi internal desa.

B. Fokus Penelitian

Sehubungan dengan luasnya ruang lingkup Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Di Kantor Desa Sungai Pandan Hulu Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka penelitian ini hanya difokuskan pada Teori Implementasi menurut George C. Edward III (dalam Agusino, 2016:136)d III (Agustino, 2016:136) yaitu :

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

C. Rumusan Masalah

Adapun Perumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Di Kantor Desa Sungai Pandan Hulu Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara ?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Di Kantor Desa Sungai Pandan Huku Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Mengacu pada rumusan masalah, maka tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Di Kantor Desa Sungai Pandan Hulu Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Di Kantor Desa Sungai Pandan Hulu Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Adapun mamfaat yang diharapkan dari hasil penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI STIA AMUNTAI

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dilakukan bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Administrasi Publik dibidang Kebijakan Publik, dan sebagai bahan untuk menambah pengetahuan atau dapat menjadi tambahan asupan ilmu tentang administrasi publik dibidang implementasi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi Pegawai dan masyarakat Kantor Desa Sungai Pandan Hulu Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara selain itu juga dapat dimanfaatkan sebagai acuan oleh peneliti lainnya yang ingin mengembangkan pokok kajian yang serupa di masa yang datang.

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
STIA AMUNTAI